

EDISI : *Kelip 16 Oktober 2019*

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI :Rabu, 16 Oktober 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Pemkab Buleleng Cegah Penyalahgunaan Medsos Pada ASN	Penyalahgunaan Media Sosial di kalangan Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat umum semakin marak, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Buleleng, menyiapkan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan manfaat medsos pada ASN serta seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diungkapkan kepala Diskominfoandi Kabupaten Buleleng I Ketut Suweca yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati atas beberapa rancangan pengaturan daerah.	
2	POS BALI	Ratusan Warga Bungkulan Ngelurug Kantor BPN Buleleng	Ratusan warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ngelurug Kantor Badan Pertanahan Nasional Buleleng, Selasa (15/10). Kedatangan mereka untuk menanyakan tindak lanjut atas kasus penyerobotan lahan lapangan sepak bola dan puskesmas pembantu I Desa Bungkulan, yang disertifikatkan perseorangan oleh Kusuma Ardana sejak tahun 2013 lalu. Rombongan warga ini dipimpin oleh Klian Banjar Adat Punduh Lo Desa Bungkulan, Putu KembarBunda bersama tokoh masyarakat Desa Bungkulan, Ketut Sumardana.	
		BUMDes Patas Bermasalah, Ditemukan Kredit macet Rp821 Juta	Kondisi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Masyarakat Desa Patas, sangat memprihatinkan. Berbagai persoalan terjadi pada BUMDes yang beriri tahun 2010 dan mulai berjalan tahun 2012 silam ini. Hal itu	

			<p>terungkap saat digelar Musyawarah Desa Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng pada Selasa (15/10) di Gor Amatha Yudha Desa Patas. Dalam musdes tersebut dibahas soal pelaporan tim penyehatan BUMDes Amatha dan tinjauan operasional BUMDes, melibatkan anggota BPD Desa Patas, aparat Desa, Perbekel Patas.</p>
		<p>Polres Buleleng Bekuk Empat Pelaku Narkoba</p>	<p>Saat asyik berada di areal peternakan ayam aduan, Made Beni Ariawan alias Cak Lole (35) warga Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, dibekuk jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng, pada Minggu (6/10) lalu sekitar pukul 16,00 wita. Penangkapan Cok Lole berkat pengembangan dari penangkapan pelaku narkoba sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diterima, penangkapan Cok Lole yang diduga sebagai pengedar dimulai dari ditangkapnya Putu Susila alias Cepot (47) sekitar pukul 15.30 wita di pinggir jalan Desa Bengkel-Banyuatis.</p>



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Radar Bali

Kategori : BPN

Lagi, Warga Gerudug Kantor Pertanahan

Desak Kejelasan Pembatalan Sertifikat Lapangan Bungkulan

SINGARAJA, Radar Bali - Puluhan warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kembali mendatangi Kantor Pertanahan Buleleng pagi kemarin (15/10). Mereka mempertanyakan perkembangan pembatalan sertifikat tanah lapangan desa dan puskesmas pembantu Desa Bungkulan, yang kini dikuasai Perbekel Bungkulan non aktif, Ketut Kusuma Ardana.

Warga datang dengan mengenakan pakaian adat Bali. Mereka juga membentangkan sebuah spanduk yang bertuliskan "Masyarakat Bungkulan mengucapkan terima kasih kepada BPN atas pembatalan sertifikat Lapangan dan Puskesmas".

Koordinator warga I Putu Kembar Budana mengatakan, proses penerbitan sertifikat tanah lapangan dan puskesmas atas nama pribadi, cacat administrasi. Sebab ada beberapa pihak yang mencabut dukungan dalam proses penerbitan sertifikat itu. Selain itu ada beberapa

hal yang disebut janggal dalam proses pemberian dukungan penerbitan sertifikat.

Budana menyebut beberapa nama yang mencabut dukungan. Di antaranya Kelian Desa Adat Bungkulan Made Mahawerdi, saksi penyangding I Made Sumardika, dan saksi penyangding Nyoman Seni. Selain itu ada dukungan yang terkesan janggal. Di antaranya dukungan yang diberikan oleh mantan Kelian Banjar Dinas Badung, almarhum Ketut Wiriasanjaya. Dukungan itu dianggap janggal, lantaran lapangan dan puskesmas berada di wilayah Banjar Dinas Dauh Munduk. "Secara de facto, sejak dulu tanah itu sudah digunakan sebagai fasilitas umum. Memang warga dan desa tidak punya bukti yuridis. Tapi yang kami pertanyakan, kok bisa terbit sertifikat pada 2013 atas nama pribadi," kata Kembar Budana.

Sementara itu Pjt. Kepala Kantor Pertanahan Buleleng Made Sudarma mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelitian data fisik dan yuridis. Tim dari Kantor Pertanahan Buleleng bersama tim dari

Kantor Wilayah Pertanahan Bali, juga sempat melakukan penelitian lokasi. Hasil penelitian itu kemudian dituangkan dalam analisa terhadap proses penerbitan sertifikat.

Sudarma menyebut dari hasil penelitian, diakui ada cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat lewat Program Nasional Agraria (Prona). "Hasil analisisnya sudah kami kirim ke Kanwil tanggal 3 Oktober lalu. Ada beberapa alas hak untuk proses penerbitan sertifikat itu, yang saksinya menarik tanda tangan. Begitu juga dengan dukungan, ada yang dicabut. Sehingga analisa kami, cacat administrasi," kata Sudarma.

Dengan kondisi tersebut, Sudarma menyatakan sertifikat bisa saja dicabut tanpa harus melalui proses pengadilan. Sertifikat itu pun hanya bisa dicabut oleh Kanwil. "Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor tidak bisa kami yang mencabut, itu harus pimpinan yang lebih tinggi, dalam hal ini kanwil. Kami mohon warga bisa bersabar, karena hasil analisa dan kajian sudah kami sampaikan," tukasnya. (eps/gup)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

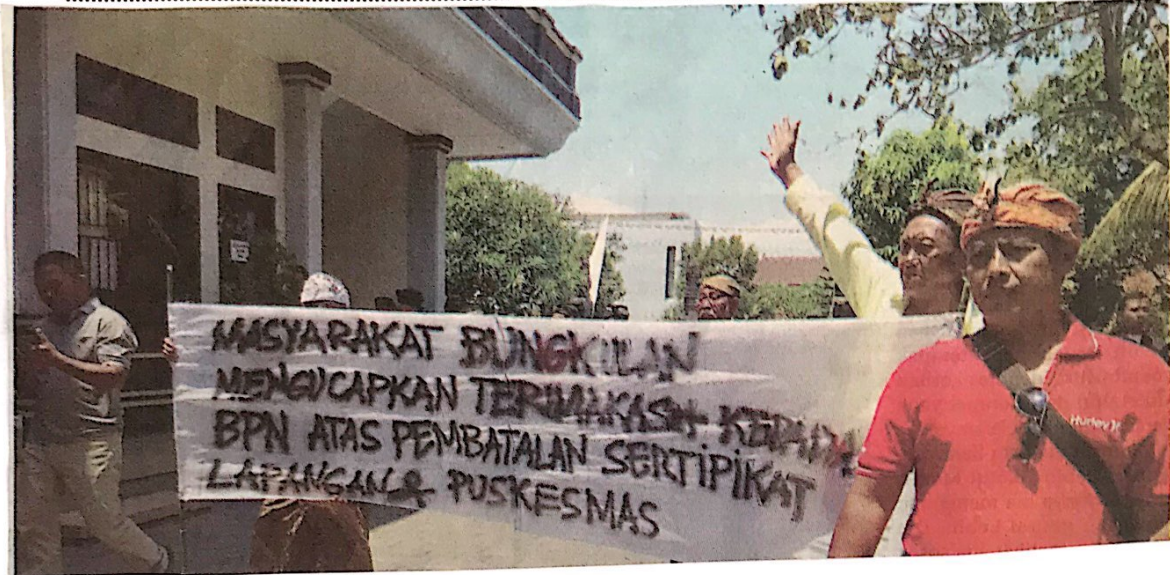
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *sambungan*





KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *PK*

Pemkab Buleleng Kalah PK di MA



Sebagai lembaga publik, pemerintah taat asas dan hukum. Pemerintah akan membayar sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan."

BAGUS GEDE BERATA
Kabag Hukum Setda Buleleng

MA Menolak, Wajib Bayar Utang ke UD-Serbajaya

SINGARAJA, *Radar Bali* - Sengketa utang piutang antara Ketut Suryata Tanaya selaku pemilik UD Serbajaya dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng mencapai titik akhir. Pemkab Buleleng dinyatakan kalah pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Pemkab Buleleng pun wajib membayar piutang di UD Serbajaya yang telah terjadi pada kurun waktu 2008-2012 silam.

Kepastian itu disampaikan lewat Putusan PK Nomor 750 PK/Pdt/2018. Putusan itu ditandatangani Ketua Majelis Hakim Mah-

kamah Agung (MA), H. Sunarto bersama H. Hamdi, dan Dr. Ibrahim.

Dalam putusan tersebut, hakim majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan PK yang diajukan oleh Bupati Buleleng ke MA.

Dengan kekalahan di tingkat PK itu, otomatis pemerintah harus membayar utang piutang pada UD Serbajaya. Jumlah tagihan yang harus dibayarkan yakni Rp 217,29 juta, sesuai dengan jumlah tagihan yang dituntut oleh Ketut Suryata Tanaya.

Kabag Hukum Setda Buleleng, Bagus Gede Berata ■

► Baca *Pemkab...* Hal 11

Pembayaran akan Dianggarkan di APBD

■ PEMKAB...

Sambungan dari hal 1

saat dikonfirmasi kemarin (15/10) mengaku sudah menerima salinan putusan PK itu. Terhadap putusan tersebut, pemerintah menyatakan patuh dan taat terhadap proses hukum yang berlaku dan sudah disahkan.

"Sebagai lembaga publik, pemerintah taat asas dan hukum. Pemerintah akan membayar sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan," kata Berata.

Lebih lanjut Berata mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan panitera di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Pertemuan itu terkait dengan eksekusi terhadap putusan PK yang sudah dinyatakan *inkraht*.

Berata menyatakan pemerintah siap melaksanakan putusan itu. Hanya saja pemerintah membutuhkan waktu, karena ada mekanisme penganggaran yang harus ditaati.

"Pembayaran itu akan dianggarkan dalam APBD. Ini kan bu-

tuh proses dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, yang juga harus ditaati. Sehingga kami membutuhkan waktu untuk itu. Kami pastikan, kami akan patuh terhadap putusan pengadilan," tegasnya.

Sekadar diketahui, sengketa utang piutang itu berawal dari pengembalian dengan mekanisme bon oleh Bagian Perencanaan dan Perawatan Aset Setda Buleleng dalam kurun waktu 2008 hingga 2012 silam. Total bon yang dilakukan Pemkab Buleleng saat

itu mencapai Rp 94.479.750.

Pemilik UD Serbajaya, Ketut Suryata Tanaya, kemudian berusaha melakukan upaya penagihan secara persuasif. Lantaran mentok, pemilik usaha kemudian mengajukan gugatan dengan nomor registrasi 360/Pdt.G/2014/PN SGR.

Dalam proses gugatan itu, pemilik meminta agar pemerintah membayar pokok utang. Juga berikut denda sebesar 6 persen per tahun sejak gugatan didaftarkan. (eps/pit)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *Dewan*

Dewan Sebut Retribusi IMTA Terjun Bebas

SINGARAJA, Radar Bali - Pendapatan daerah dari sektor retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), diprediksi terjun bebas pada tahun ini. Peralihan *leading sector* pemungutan, diduga sebagai pemicu anjloknya pendapatan dari sektor ini.

Temuan itu diungkap Anggota Komisi III DPRD Buleleng Wayan Masdana. "Ini jelas ada yang tidak maksimal kinerjanya. Tahun lalu realisasinya tinggi, sekarang realisasinya belum sampai 30 persen. Dinas Perizinan

sebagai *leading sector* sebenarnya harus pro aktif. Apalagi potensinya cukup besar," kata Masdana. Beber dia, tahun lalu IMTA ditarget Rp 1,85 miliar. Realisasinya kala itu mencapai Rp 1,87 miliar. Saat itu retribusi IMTA dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Buleleng. Kini, pemungutan dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng. Target Rp 1,5 miliar, namun realisasinya hingga bulan September 2019 baru mencapai Rp 362,2

juta atau sekitar 24,15 persen dari target.

Sementara itu Kepala Dinas PMPPTSP Buleleng Putu Artawan tak menampik realisasi retribusi IMTA yang masih minim. Meski begitu, Artawan optimistis akan mencapai target Rp 1,5 miliar seperti yang telah disepakati dalam target retribusi.

Menurutnya untuk pembayaran IMTA, pihaknya mengoptimalkan sistem online. Dalam kurun waktu Juni hingga Oktober, disebut ada 35 orang tenaga kerja asing (TKA) yang

menyetorkan retribusi IMTA, dengan nilai total Rp 533,92 juta. Apalagi, pihaknya baru bisa memungut retribusi IMTA sejak Mei. Menyusul terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng Nomor 147 Tahun 2018, yang intinya mengatur pendelgasian perizinan IMTA. "Kalau target Rp 1,5 miliar itu, kami optimistis tercapai. Kan masih ada sisa 65 orang pekerja asing yang belum memperpanjang izin sampai bulan Desember mendatang," tegas Artawan. (eps/gup)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *Narkoba*

NARKOBA



JULIADURADAR BALI

TANGKAPAN: Polisi menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus narkoba.

Lagi di Peternakan, Cak Lole Dibekuk

SINGARAJA, *Radar Bali* - Ketika asyik berada di areal peternakan sabu ayam aduan, Made Beni Ariawan alias Cak Lole, 35 warga Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, dibekuk jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng, Minggu (6/10) lalu sekitar pukul 16.00. Penangkapan Cak Lole ini berkat pengembangan dari penangkapan pelaku narkoba sebelumnya.

Polisi membekuk Cak Lole yang diduga sebagai pengedar bermula dari penangkapan Putu Susila alias Cepot, 47, sekitar pukul 15.30 di pinggir Jalan Desa Bengkel-Banyuatis. Dari tangan Cepot, polisi menemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,26 gram yang sempat dibuang oleh Cepot. Cepot mengaku barang haram tersebut dibeli dari Cak Lole seharga Rp 500 ribu. Atas keterangan Cepot, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Cak Lole di lokasi peternakan ayam aduan di Desa Banyuatis.

Adapun barang bukti yang diamankan dari tangan Cak Lole berupa uang tunai Rp 500 ribu hasil penjualan, satu buah botol aqua bekas yang tutupnya ada 2 lubang, satu korek api gas, tiga plastik klip bekas pakai.

Kasat Narkoba Polres Buleleng, AKP Made Derawi mengatakan selain menangkap kedua pelaku yang masih satu jaringan Cak Lole dan Cepot. Polisi juga kembali menciduk dua pelaku lainnya yakni, Nusrat Dana Jaya alias Dani, 47; dan Richard Nashar alias Richard, 34. (uli/gup)



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *Sengketa Tanah*

LSM Gema Nusantara Adukan Kapolres Buleleng ke Propam dan Kompolnas. Tanyakan Perkembangan Kasus Istri via WA, Su Liong Merasa Ditantang

Kapolres Buleleng AKBP Suratno diadukan ke Bidang Propam Polda dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pengaduan itu dilayangkan LSM Gema Nusantara, terkait dugaan pelanggaran atas nilai dan kode etik kepolisian.

EKA PRASETYA, Singaraja, Radar Bali

LAPORAN itu disebut telah dilayangkan pada 20 Agustus 2019 lalu, dan telah mendapat

tanggapan dari Propam Polda Bali dan Kompolnas. Pengaduan itu sebenarnya berawal dari laporan yang dilakukan oleh mendiang Ong Bie Swan pada 2013 lalu. Ong Bie Swan sendiri istri dari anggota LSM Gema Nusantara, Tjhie Su Liong. Saat itu Ong Bie Swan melaporkan iparnya, Kang Siu Hong, atas dugaan penipuan pemecahan sertifikat tanah, yang terjadi di salah satu kantor notaris yang terletak di Jalan Kartini.

Selama enam tahun, kasus itu tak ada perkembangan. Hingga akhirnya Ong Bie Swan tutup usia sekitar tiga bulan lalu. Tjhie



EKA PRASETYA/RADAR BALI

BAWA BUKTI: Tjhie Su Liong (kiri) didampingi Ketua Badan Eksekutif LSM Gema Nusantara Antonius Sanjaya Kiabeni.

Su Liong kemudian sempat menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkan istrinya pada Kapolres Suratno, melalui

aplikasi WhatsApp. "Yang saya sayangkan, di WA itu kapolres seolah menantang saya. Itu kekecewaan saya sebagai masyarakat. Sedangkan polisi itu kan pengayom masyarakat," kata Su Liong saat ditemui di DPRD Buleleng kemarin (15/10).

Su Liong bersama LSM Gema Nusantara kemudian melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Bidang Propam dan Kompolnas. Selang beberapa pekan sejak laporan itu dilayangkan, Su Liong yang juga mantan anggota DPRD Buleleng itu mengaku menerima

Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dari Polres Buleleng terkait laporan yang dilayangkan mendiang istrinya enam tahun silam.

Lebih lanjut Su Liong mengatakan, pengaduan yang dilayangkan telah ditindaklanjuti Kompolnas lewat Surat nomor B-2247B/Kompolnas/9/2019. Dalam surat yang ditandatangani Anggota Kompolnas Yotje Mende itu, LSM Gema Nusantara diminta melaporkan dugaan tindakan pelanggaran etik itu pada Bidang Propam Polda Bali, berdasarkan fakta dan dilengkapi dengan bukti-

bukti yang ada. "Saya juga sudah sempat memberikan keterangan di Bidang Propam Polda. Saya lupa tanggalnya, yang jelas waktu itu hari Selasa," klaimnya.

Sementara itu pihak Polres Buleleng belum memberikan tanggapan terkait pengaduan tersebut. Kasubbag Humas Iptu Gede Sumarjaya yang dikonfirmasi kemarin, belum bersedia berkomentar terkait pengaduan itu. "Kami belum dapat informasi terkait pengaduan itu. Jadi belum bisa berikan komentar. Nanti kami akan cek dulu, biar tidak keliru," kata Sumarjaya. (*gup)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Radar Bali

Kategori : BUMDes

BUMDes Bangkrut, Ulah Karyawan dan Pengurus

Pinjam tanpa Agunan, Banyak Kredit Macet

GEROKGAK - Pemkab Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sejatinya rutin melakukan pengawasan dan meningkatkan performa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Demikian, banyak BUMDes yang masuk kategori sakit atau bahkan bangkrut karena ulah dari karyawan dan pengurusnya sendiri.

Seperti apa? Ini terungkap dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar oleh masyarakat Desa Patas, Gerokgak di GOR Amarth Yudha, Selasa (15/10). Koordinator Tim Penyehatan BUMDes Amarth Desa Patas Komang Widiartawan menjelaskan BUMDes Desa Patas sudah sakit. Pasalnya sisa uang saat ini hanya Rp 21 juta dari Rp 1 miliar modal BUMDes. Itu setelah diaudit oleh sembilan orang anggota timnya sejak Juni lalu. "Modal



JULIADIRADAR BALI

AUDIT: Musyawarah Desa Patas terkait pelaporan tim penyehatan BUMDes Amarth dan tinjauan operasional di GOR Amarth Yudha.

BUMDes AMARTHA DESA PATAS

- **MODAL** awal Rp 1 miliar berasal dari dana hibah.
- **DEMIKIAN**, seiring berjalannya waktu yang tersisa hanya Rp 21 juta.
- **BERDASAR** audit Tim Penyehatan BUMDes ditemukan beberapa kejanggalan.
- **YAKNI**, beberapa karyawan dan pengurus meminjam uang tanpa jaminan.
- **TERCATAT** Rp 821 juta kredit masuk kategori macet.
- **SEPARO** lebih atau sebesar Rp 465 juta ternyata pinjaman karyawan dan pengurus tanpa agunan.
- **UNTUK** itu Tim Penyehatan BUMDes mendesak perombakan pengurus dan menempuh jalur hukum karena ada kerugian negara.

itu didapat dari suntikan dana hibah pemerintah Provinsi Bali dengan dana melalui Program

Gerbang Sadu Mandara, LPMD, dan pemerintah desa," terangnya.

Tim audit menemukan kejanggalan lainnya pengelolaan dana BUMDes. Uang beradar di masyarakat termasuk digunakan oleh pengurus dan karyawan dengan kredit macet mencapai Rp 821 juta. Parahnya lagi dari uang macet tersebut paling besar digunakan oleh pengurus dan karyawan Rp 465 juta. "Pengurus dan karyawan meminjam uang di BUMDes tanpa jaminan apapun. Hanya modal fotocopy KK dan fotocopy KTP. Nilai yang dipinjamkan puluhan sampai ratusan juta tanpa jaminan. Sedangkan sisa uang lainnya digunakan untuk operasional bumdes," terangnya.

Di sisi lain Widiartawan juga mengatakan pengurus BUMDes sejak terbentuk tahun 2010 hanya sekali memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) saat itu dilakukan Musdes pada Juni lalu. Sehingga masyarakat menolak LPJ mereka, karena LPJ yang dibuat mengada-ngada dengan membuat LPJ BUMDes untung Rp 30 juta. "Terkait

banyak temuan kejanggalan kami sudah merekomendasi beberapa kepada pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Baik itu perompakan pengurus dan menempuh jalur hukum," ungkapnya. Ini dilakukan karena dari pengurus tidak ada niat baik untuk mengembalikan dana BUMDes. "Selain itu ada kerugian negara juga ditimbulkan," imbuhnya.

Perbekel non aktif Desa Patas Nyoman Suberata mengakui memang sejak 2012 BUMDes di desanya tersebut sakit.

Kredis banyak yang macet dan pengurus lari dari tanggung jawab. Ditambahkan oleh Ketua BPD Desa Patas Nursalim mengatakan terkait adanya permintaan dari masyarakat agar proses BUMDes ini terus dikawal oleh BPD. Pihaknya di BPD hanya bisa mengawal, sedangkan yang memiliki kewenangan perbekel. Terlebih lagi menempuh ranah hukum. "Kami bisa mengawal, dan menunggu proses selanjutnya dari pemerintah desa," tegasnya. (uli/gup)